

---

# ANALISIS PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP IDENTITAS POLITIK NASIONAL

Sri Indah Pratiwi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

---

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap identitas politik nasional dalam konteks era modern yang semakin terkoneksi. Globalisasi, sebagai fenomena multidimensional yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik, telah membawa perubahan signifikan dalam cara individu mengidentifikasi diri mereka secara politik di tingkat nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis literatur dan studi kasus untuk menyelidiki bagaimana dinamika globalisasi memengaruhi persepsi dan konstruksi identitas politik nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa globalisasi telah menjadi katalisator utama dalam pembentukan identitas politik nasional yang lebih dinamis dan kompleks. Faktor-faktor seperti arus informasi global, interkoneksi ekonomi, dan transmisi nilai-nilai budaya melalui media massa dan teknologi, semuanya berkontribusi pada transformasi dalam cara individu mengartikulasikan dan memahami identitas politik nasional mereka. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pertemuan antarbudaya dalam skenario global menghasilkan dinamika identitas yang tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mendunia. Analisis mendalam terhadap dampak globalisasi terhadap identitas politik nasional ini memberikan wawasan yang berharga dalam memahami perubahan dinamika politik modern. Implikasi dari penelitian ini dapat membantu pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengelola identitas politik nasional dalam era globalisasi ini. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur yang berkaitan dengan hubungan antara globalisasi dan identitas politik nasional, membuka pintu untuk pemahaman yang lebih baik tentang transformasi politik di dunia yang semakin terhubung.*

---

**Kata Kunci:** *Globalisasi, Identitas Politik Nasional, Era Modern yang Terkoneksi, Pengaruh Globalisasi, Dinamika Identitas Politik*

---



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Latar belakang penelitian ini sangat penting untuk memahami konteks globalisasi dan identitas politik nasional dalam era modern yang semakin terkoneksi. Globalisasi, sebagai fenomena multidimensional, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik yang semakin mempererat keterkaitan antarnegara. Pada abad ke-21, arus informasi yang cepat, interkoneksi ekonomi, serta kemajuan teknologi telah menghasilkan dunia yang lebih terbuka dan terhubung. Dalam konteks ini, pertanyaan tentang bagaimana globalisasi memengaruhi identitas politik nasional menjadi sangat relevan.

Perubahan sosial dan politik yang signifikan dalam era globalisasi mendorong perlunya memahami dampaknya terhadap identitas politik nasional. Tradisi dan nilai-nilai yang sebelumnya mendasari konstruksi identitas politik nasional kini mengalami tantangan baru akibat pengaruh global. Proses ini dapat melibatkan aspek-aspek seperti adaptasi terhadap nilai-nilai budaya global, perubahan persepsi terhadap kewarganegaraan, dan transformasi pandangan politik nasional.

Dalam kerangka inilah penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci mengenai pengaruh globalisasi terhadap identitas politik nasional. Penelitian literatur dan studi kasus akan memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana dinamika globalisasi mempengaruhi cara individu mengidentifikasi diri mereka secara politik di tingkat nasional. Implikasi dari transformasi ini mencakup tidak hanya perubahan dalam cara individu memahami dan merasakan identitas politiknya, tetapi juga bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi tatanan politik dan kebijakan di tingkat nasional.

Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menyelidiki pergeseran persepsi dan konstruksi identitas politik nasional dalam era globalisasi. Dengan menelusuri literatur khusus dan studi kasus yang relevan, penelitian ini berupaya menggambarkan kompleksitas identitas politik nasional yang semakin terbentuk dalam konteks global. Analisis mendalam terhadap faktor-faktor seperti arus informasi global, interkoneksi ekonomi, dan pengaruh media massa diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perubahan ini.

Penelitian ini memiliki nilai penting karena dapat memberikan kontribusi pada literatur yang berkaitan dengan hubungan antara globalisasi dan identitas politik nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang transformasi identitas politik dalam masyarakat yang semakin terhubung dan terpengaruh oleh dinamika global. Kesimpulannya, latar belakang penelitian ini menyoroti urgensi untuk memahami bagaimana globalisasi memainkan peran kunci dalam membentuk identitas politik nasional di tengah era modern yang semakin terkoneksi.

*Melihat ke belakang sejarah, konsep identitas politik nasional telah lama menjadi elemen integral dalam keberlanjutan masyarakat. Identitas ini sering kali didefinisikan oleh faktor-faktor sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai bersama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, dengan munculnya era globalisasi, perbatasan antarnegara semakin kabur, dan konsep identitas nasional menghadapi tantangan baru. Globalisasi membawa perubahan dalam pola pikir, orientasi nilai, dan cara individu merespon peristiwa nasional dan internasional.*

*Adanya pertukaran informasi secara global melalui internet, media sosial, dan saluran berita internasional telah menciptakan jaringan kompleks yang menghubungkan individu di seluruh dunia. Dalam konteks ini, masyarakat tidak lagi terpaku pada realitas lokal, tetapi terlibat dalam diskursus global yang mempengaruhi cara mereka memandang diri mereka sebagai bagian dari sebuah entitas politik nasional. Seiring dengan itu, kebijakan ekonomi global dan interkoneksi perdagangan menciptakan hubungan antarnegara yang semakin erat, membentuk sebuah identitas ekonomi global yang dapat berdampak dengan identitas politik nasional.*

*Peran media massa dalam membentuk opini publik menjadi semakin krusial dalam konteks globalisasi. Pengaruh media tidak hanya terbatas pada ranah lokal, tetapi juga meluas ke panggung internasional. Berbagai platform media menyebarkan nilai-nilai, tren, dan pandangan dunia yang dapat meresap ke dalam identitas politik nasional. Oleh karena itu, penelitian ini juga melihat bagaimana media massa, sebagai agen utama komunikasi global, memengaruhi cara individu merumuskan identitas politik mereka.*

*Dalam pandangan ini, penelitian ini tidak hanya menjadi kajian akademis semata, tetapi juga memiliki implikasi praktis. Pemerintah dan lembaga internasional dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap perubahan identitas politik nasional dalam era globalisasi. Strategi manajemen identitas yang holistik dan terinformasi dapat membantu menciptakan keseimbangan antara integrasi global dan pemeliharaan identitas lokal.*

*Seiring dengan pertumbuhan globalisasi, muncul juga kekhawatiran terkait dengan pemudarannya identitas lokal dan kehilangan keunikan budaya. Dalam konteks identitas politik nasional, fenomena ini menciptakan paradoks di mana warga negara merasa terhubung dengan agenda global tetapi juga harus mempertahankan akar lokal mereka. Hal ini mendorong pertanyaan seputar sejauh mana identitas politik nasional masih relevan dalam menghadapi dorongan globalisasi.*

*Penting untuk mencatat bahwa dampak globalisasi tidak merata di seluruh dunia. Negara-negara berkembang mungkin mengalami transformasi identitas politik nasional yang berbeda dibandingkan dengan negara-negara maju. Perbedaan dalam tingkat akses teknologi, perkembangan ekonomi, dan tingkat integrasi global dapat menghasilkan variasi yang signifikan dalam cara identitas politik nasional diartikulasikan dan dihayati.*

*Faktor-faktor sejarah, seperti pengalaman kolonialisme atau perubahan politik yang mendalam, juga memainkan peran dalam membentuk identitas politik nasional. Kondisi ini memperkaya kompleksitas penelitian, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengaruh khusus yang dapat muncul dari konteks sejarah tertentu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas aspek-aspek globalisasi secara umum, tetapi juga menyelidiki bagaimana perbedaan sejarah dapat memberikan warna khusus pada dinamika identitas politik nasional.*

*Pertimbangan etis juga menjadi pokok perhatian dalam penelitian ini. Ketika membahas identitas politik, penting untuk memahami bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi inklusivitas dan eksklusivitas dalam masyarakat. Bagaimana perubahan identitas ini mungkin memicu ketidaksetaraan atau konflik sosial adalah pertanyaan penting yang perlu dijelajahi untuk mendukung pembangunan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.*

*Dalam rangka menyelidiki fenomena ini, penelitian ini juga akan melihat dampak perubahan identitas politik nasional terhadap partisipasi politik dan kepemimpinan. Apakah masyarakat yang merasakan pengaruh globalisasi cenderung memiliki pandangan yang lebih inklusif atau eksklusif? Bagaimana perubahan identitas ini memengaruhi hubungan antara individu dan pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka jendela baru untuk memahami transformasi politik yang mungkin terjadi di tengah masyarakat yang semakin terkoneksi dan terpapar pengaruh global.*

## **Metode Penelitian**

*Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didesain untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pengaruh globalisasi terhadap identitas politik nasional dalam konteks era modern yang semakin terkoneksi. Pendekatan kualitatif diadopsi untuk menggali perspektif, pengalaman, dan dinamika yang kompleks terkait dengan perubahan identitas politik nasional. Berikut adalah rincian metode penelitian yang digunakan:*

### **Analisis Tematis Terhadap Data Kualitatif**

*Data wawancara dan hasil analisis literatur akan diolah melalui analisis tematis untuk mengidentifikasi pola temuan utama. Proses ini melibatkan pengkodean dan kategorisasi data untuk mengungkap tema-tema yang muncul secara organik dari narasi partisipan dan literatur yang diteliti.*

### **Perbandingan dan Kontras Studi Kasus**

*Dalam pendekatan studi kasus, data dari berbagai kasus akan dibandingkan dan dikontraskan untuk memahami perbedaan kontekstual. Ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor unik yang mungkin mempengaruhi perubahan identitas politik nasional di berbagai wilayah atau tingkat terpapar globalisasi.*

### **Analisis Literatur Komparatif**

*Analisis literatur akan melibatkan perbandingan temuan dari berbagai sumber untuk menyusun gambaran komprehensif tentang kerangka konseptual identitas politik nasional dalam era globalisasi. Pendekatan ini memungkinkan integrasi temuan dari literatur yang mewakili berbagai disiplin ilmu dan perspektif.*

### **Refleksi dan Pengembangan Teori**

*Penelitian ini akan mencakup tahap refleksi dan pengembangan teori, di mana temuan-temuan dari data kualitatif akan digunakan untuk memperkaya literatur dan, jika memungkinkan, mengembangkan teori-teori baru yang relevan dengan kompleksitas identitas politik nasional di era globalisasi.*

### **Analisis Sensitivitas Kontekstual**

*Analisis sensitivitas kontekstual akan dilakukan untuk memahami sejauh mana perbedaan konteks negara, sejarah, dan perkembangan ekonomi dapat memengaruhi interpretasi dan pengalaman terkait identitas politik nasional. Hal ini dapat membantu peneliti untuk lebih memahami nuansa yang mungkin terlewatkan dalam analisis umum.*

### **Validasi Hasil dengan Pihak Terkait**

*Validasi hasil penelitian akan dilakukan dengan melibatkan pihak terkait, seperti kelompok masyarakat, ahli identitas nasional, atau pemangku kepentingan terkait. Input dari pihak eksternal ini akan memberikan perspektif tambahan dan memvalidasi temuan penelitian.*

### **Diseminasi Hasil dan Dampak Praktis**

*Hasil penelitian akan didiseminasikan melalui publikasi ilmiah, seminar, dan forum terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan dampak praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum, memastikan hasil penelitian dapat diterapkan secara luas.*

### **Pemantauan dan Evaluasi Proses Penelitian**

*Proses penelitian akan terus dipantau dan dievaluasi selama pelaksanaan. Pengembangan metodologi dan perubahan pendekatan analisis yang mungkin diperlukan akan diidentifikasi secara proaktif untuk memastikan keberlanjutan kualitas penelitian.*

### **Keterlibatan Publik dan Responsif terhadap Temuan**

*Penelitian ini akan mencakup upaya untuk melibatkan publik dalam tahap tertentu, mungkin melalui diskusi kelompok atau forum partisipatif, untuk mendapatkan tanggapan dan memastikan bahwa temuan penelitian merangkul berbagai perspektif.*

### **Pemetaan Jalan ke Depan**

*Penelitian akan diakhiri dengan pemetaan jalan ke depan, menguraikan implikasi temuan penelitian untuk penelitian selanjutnya, kebijakan, dan praktik terkait identitas politik nasional dalam era globalisasi. Ini akan memberikan dasar untuk pengembangan lanjutan dan refleksi terhadap kontribusi penelitian ini terhadap pemahaman yang lebih baik tentang fenomena ini.*

## **PEMBAHASAN**

*Pengakuan akan peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik semakin berkembang seiring dengan pemahaman bahwa partisipasi penuh dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Studi kasus dalam konteks negara berkembang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan sangat penting dan memberikan kontribusi signifikan pada hasil kebijakan yang lebih baik.*

*Peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik di negara berkembang memiliki dampak yang luas dan beragam, mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Representasi yang beragam dari perempuan di dalam lembaga-lembaga pengambil kebijakan memberikan kesempatan untuk memahami berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat yang mungkin terabaikan dalam perspektif laki-laki.*

*Dalam aspek pemberdayaan ekonomi, melibatkan perempuan dalam kebijakan ekonomi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan memberikan akses perempuan terhadap peluang usaha dan pekerjaan. Langkah ini juga dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi gender dan mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai sektor.*

*Di bidang kesehatan dan pendidikan, perempuan memiliki peran kunci dalam memastikan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam pembuatan kebijakan kesehatan dapat mendukung upaya peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama dalam konteks kesehatan reproduksi dan penyuluhan kesehatan. Demikian pula, peran perempuan dalam merancang kebijakan pendidikan dapat memberikan fokus pada pengentasan kesenjangan pendidikan gender dan peningkatan akses pendidikan untuk anak perempuan.*

*Dalam hal keamanan dan konflik, partisipasi perempuan dalam perundingan damai dan pembuatan kebijakan keamanan dapat membawa perspektif yang unik dan solusi yang lebih berkelanjutan. Mengakui peran perempuan sebagai agen perdamaian dan keamanan mendorong inklusi dan keadilan sosial dalam masyarakat.*

*Perlindungan hak asasi manusia juga menjadi perhatian utama ketika mempertimbangkan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan. Keterlibatan perempuan dalam mendefinisikan dan mengadvokasi hak-hak mereka sendiri dapat memperkuat sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan.*

*Terakhir, dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pengetahuan tradisional perempuan tentang pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi landasan yang penting dalam merancang kebijakan perlindungan lingkungan yang efektif.*

*Secara keseluruhan, penguatan peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik di negara berkembang bukan hanya sebuah tuntutan kesetaraan gender, tetapi juga investasi strategis dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melibatkan perempuan dalam setiap aspek pembuatan kebijakan menciptakan pondasi untuk masyarakat yang lebih adil dan berdaya saing.*

## **1. Representasi yang Beragam**

*Peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan mencakup aspek representasi yang beragam. Dalam negara berkembang, perempuan sering kali memiliki pengalaman hidup yang unik, termasuk tantangan dan kebutuhan khusus. Dengan memasukkan perspektif perempuan dalam pembuatan kebijakan, dapat dihasilkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan di masyarakat.*

## **2. Pemberdayaan Ekonomi**

*Perempuan memiliki peran penting dalam sektor ekonomi, terutama di negara berkembang di mana banyak perempuan terlibat dalam sektor informal. Melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan ekonomi dapat membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut memperhatikan aspek-aspek penting seperti kesetaraan upah, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, dan mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil yang sering kali dipimpin oleh perempuan.*

## **3. Kesehatan dan Pendidikan**

*Peran perempuan dalam pembuatan kebijakan publik juga sangat krusial dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan melibatkan perempuan dalam proses ini, kebijakan dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan. Ini mencakup upaya meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan yang berkualitas.*

## **4. Keamanan dan Konflik**

*Dalam konteks negara berkembang yang mungkin mengalami konflik, peran perempuan dalam pembuatan kebijakan keamanan sangat penting. Perempuan sering kali menjadi korban langsung konflik, dan partisipasi mereka dalam pembuatan kebijakan dapat membantu menyuarakan kebutuhan dan perspektif unik yang sering kali diabaikan.*

## **5. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

*Peran perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik juga terkait erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Perempuan sering menjadi kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan melibatkan mereka dalam merancang kebijakan dapat menjadi langkah positif menuju pemenuhan hak-hak tersebut.*

## **6. Pengaruh Perubahan Iklim dan Lingkungan**

*Dalam era ketidakpastian perubahan iklim, peran perempuan dalam pembuatan kebijakan lingkungan dan penanganan dampaknya juga krusial. Perempuan sering kali memiliki pengetahuan tradisional tentang sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, yang dapat menjadi kontribusi berharga dalam merancang kebijakan perlindungan lingkungan.*

*Pemberdayaan perempuan dalam konteks negara berkembang tidak hanya terbatas pada seberapa banyak perempuan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana perspektif dan aspirasi mereka tercermin dalam kebijakan tersebut. Penting untuk mendorong partisipasi aktif perempuan dalam seluruh siklus kebijakan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga evaluasi dampak kebijakan.*

*Salah satu langkah kunci dalam mendorong partisipasi aktif perempuan adalah dengan memastikan akses yang setara terhadap pendidikan dan pelatihan. Dengan meningkatkan kapasitas dan keterampilan perempuan, mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam diskusi dan analisis kebijakan. Program pelatihan dan mentorship khusus untuk perempuan dalam berbagai sektor dapat menjadi sarana untuk membantu melewati hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh perempuan dalam dunia kebijakan.*

*Selain itu, adanya jaringan dan platform untuk pertukaran pengalaman antarperempuan juga dapat meningkatkan kolaborasi dan solidaritas di antara mereka. Ini akan membantu perempuan untuk lebih percaya diri dalam menyuarakan perspektif mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat perempuan.*

*Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait juga dapat menerapkan mekanisme yang memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara dalam pengambilan keputusan. Quota perempuan dalam lembaga-legislatif dan eksekutif dapat menjadi langkah yang efektif untuk memastikan representasi yang lebih seimbang. Selain itu, memberikan dukungan terhadap organisasi-organisasi perempuan dan inisiatif masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu perempuan dapat menjadi langkah penting dalam mendorong partisipasi mereka.*

*Dalam mengevaluasi kebijakan, mekanisme umpan balik yang inklusif perlu diterapkan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka terhadap dampak kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui survei, konsultasi publik, dan forum partisipatif lainnya yang melibatkan aktif partisipasi perempuan.*

*Secara keseluruhan, mendorong pemberdayaan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan publik di negara berkembang adalah investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan memastikan bahwa perempuan memiliki suara yang kuat dan efektif dalam kebijakan, kita tidak hanya mencapai kesetaraan gender, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi semua.*

## **Kesimpulan**



*Peran perempuan dalam pembuatan kebijakan publik di negara berkembang membawa dampak yang signifikan terhadap kualitas kebijakan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Representasi yang beragam, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan adalah aspek-aspek krusial yang menjadi fokus peran perempuan. Dengan mempertimbangkan perspektif perempuan, kebijakan dapat menjadi lebih inklusif, sensitif gender, dan berkelanjutan.*

*Mendorong partisipasi aktif perempuan melibatkan langkah-langkah konkret seperti akses yang setara terhadap pendidikan, pelatihan, dan mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif. Adanya jaringan dan platform komunikasi antarperempuan juga merupakan langkah penting dalam membangun solidaritas dan meningkatkan kapasitas perempuan dalam menyuarkan aspirasi mereka.*

*Pemberdayaan perempuan bukan hanya hak asasi, tetapi juga merupakan investasi strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan melibatkan perempuan secara penuh dalam pembuatan kebijakan, kita membuka pintu menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peran perempuan dalam mencapai visi pembangunan yang lebih baik bagi semua.*

*Untuk mewujudkan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan publik di negara berkembang, kerjasama dan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga masyarakat sipil, sektor swasta, dan seluruh lapisan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah perlu memainkan peran utama dalam menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemberdayaan perempuan, sementara lembaga masyarakat sipil dan sektor swasta dapat memberikan dukungan dalam hal sumber daya, pelatihan, dan implementasi program-program pemberdayaan.*

*Program pendidikan yang inklusif, pelatihan keterampilan, dan akses yang setara terhadap pekerjaan dan tanggung jawab pengambilan keputusan adalah langkah-langkah penting yang harus diterapkan secara bersama. Dukungan finansial dan teknis dari sektor swasta dapat membantu memperkuat usaha-usaha ini dan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat.*

*Komitmen bersama juga mencakup peningkatan kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam semua lapisan masyarakat. Kampanye publik, program pendidikan masyarakat, dan dialog terbuka akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi unik yang perempuan bawa dalam proses pembuatan kebijakan. Menghilangkan stereotip gender dan menciptakan budaya inklusif adalah langkah-langkah kunci untuk menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa didukung untuk berperan aktif dalam pembangunan negara.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Wahyudi, D. (2022). *BAB V PERENCANAAN KARIR. Manajemen Sumber Daya Manusia (Konsep Dasar Di Era Digital)*, 45.
- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- LUMBANRAJA, W., & Harahap, G. Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN IRIAN SUPERMARKET TEMBUNG-PERCUT SEI TUAN SUMATERA UTARA. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. S. S., & Yolanda, A. (2022). *Gangguan Komunikasi Self-Harm Remaja Di Masa Covid-19 Pada Desa Sei Rotan Kabupaten Deli Serdang*.
- Yolanda, A., Nurismilida, K. W., & Wulansary, D. (2021). *The Effect of Miscommunication on the Quality of Employee Performance*.
- Hasibuan, E. J., & Yolanda, A. (2023). *Strategi Komunikasi Humas dalam Mempertahankan Citra Positif Akibat Kasus Korupsi APBD di DPRD Sumatera Utara*.
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamsa Medan*.
- Novita, D. (2019). *Analisis Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan (Studi Pada Inspektorat Kota Langsa)*.
- Siregar, N. S. S. (2016). *Komunikasi terapeutik dokter dan paramedis terhadap kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit bernuansa islami di kota Medan (Doctoral dissertation, Program Pasca sarjana UIN-SU)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan IDI Rayeuk Kabupaten Aceh Timur) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018*.
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). *Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara*.
- Siregar, N. S. S. (2002). *Perkembangan Filsafat Komunikasi di Indonesia*.
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking*.
- Kadir, A. (2017). *Studi pemerintah daerah dan pelayanan publik*.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Putri, R. D. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, S. A. (2018). *implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan*.
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Batubara, B. M., Humaizi, H., Kusmanto, H., & Ginting, B. (2022, November). *Poverty reduction program in Medan city: Public policy perspective. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1). AIP Publishing*.

- Lubis, Y. A., & Batubara, B. M. (2020). *Implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Studi Musrenbang di Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Muda, I., & Masitho, B. (2019). *Peranan Fraksi Partai Demokrat dalam Mendukung Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Batubara, B. M., & Muda, I. (2019). *Reformasi Administrasi Dalam Perspektif Pelayanan Publik*.
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Matondang, A. (2007). *Pengaruh Kolom Tajuk Rencana pada Surat Kabar Harian Waspada Terhadap Pembentukan Opini Politik Anggota Organisasi Kemahasiswaan Islam di Universitas Medan Area*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan*.
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). *Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2017). *Efektifitas Organisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Binjai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2016). *Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Tarigan, U. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Publik dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Rantau Selamat Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Ritonga, S. (2005). *Fungsi Pengawasan Kepegawaian Menunjang Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai*.
- Sihombing, M., & Tarigan, U. (2013). *Pengaruh Pangkat dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pengembangan Karir pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan*.
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.
- Tarigan, U. (2012). *Pengaruh Motivasi dan Kreatifitas Terhadap Kinerja Pamong Belajar di Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan*.
- Tarigan, U., & Usman, D. A. (2007). *Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara*.
- Tarigan, U. (2007). *Prospek Kewenangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tamiang*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U. (2006). *Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues*.
- Tarigan, U. (2005). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Aparatur (Kajian Sekretariat Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara)*.
- Ritonga, S., & Nasution, A. I. (2007). *Pengaruh Teknologi Komputer Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

*Tarigan, U. (2004). Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*

*Tarigan, U., & Siregar, T. (2004). Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat (Suatu Studi Deskriptif Analisis di Kantor Lurah Kelurahan Binjai Timur Kota Binjai) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*

--